KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DI LAKUKAN KOORPORASI

Boy Anggara¹, Imas Rosidawati Wiradirja², Syahrul Machmud³

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Langlangbuana

¹boy.anggara@gmail.com, ²imasrosidawati047@gmail.com,

³syahrul.machmud@yahoo.com

Abstract - The application of environmental criminal law is currently not optimal due to the absence of synchronization, or alignment, both structurally, substantially and culturally, in the criminal justice system from the police, prosecutors, courts and correctional institutions. The repetition of environmental crimes by individual and corporate legal subjects proves that there is disharmony between POLRI and PPNS investigators in tackling environmental crimes. This study aims to analyze how to resolve the conflict of investigation authority between Indonesian Police investigators and PNS investigators in enforcing environmental criminal law and how to harmonize the conflict of authority between POLRI investigators and PPNS. Normative juridical research methods or legal research libraries, sources of data used secondary data legal materials. The results of the analysis in this study indicate, the regulation of PPNS authority in environmental crimes is not in accordance with the criminal justice system based on the principle of *lex specialis derogat legi generalis*, the Criminal Procedure Code as a generalist and Law no. 32 of 2009 is the *lex specialis* of environmental crimes when the submission of the results of the investigation must go through the POLRI investigators. Meanwhile, the authority of POLRI investigators in Law Number 32 year 2009 is not clearly regulated.

Keywords : Authority, Investigator, the environment

Abstrak - Penerapan hukum pidana lingkungan saat ini belum optimal disebabkan karena ketiadaan sinkronisasi, atau keselarasan baik secara struktural, substansial maupun kultural pada sistem peradilan pidana dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Terjadinya pengulangan kejahatan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan subjek hukum perseorangan dan Korporasi membuktikan ada ketidak harmonisan penyidik POLRI dan PPNS dalam menanggulangi kejahatan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian konflik kewenangan penyidikan antara penyidik Kepolisian RI dengan Penyidik PNS dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan bagaimana upaya harmonisasi terhadap konflik kewenangan antara penyidik POLRI dengan PPNS. Metode pendekatan Yuridist normatif, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Hasil analisis menunjukkan, pertama pengaturan kewenangan PPNS dalam tindak pidana lingkungan hidup tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generalis*, KUHP sebagai *generalis* dan UU No. 32 Tahun 2009 adalah *lex specialis* tindak pidana lingkungan hidup pada saat penyampaian hasil penyidikannya harus melalui penyidik POLRI. Sementara, kewenangan penyidik POLRI dalam UU No. 32 Tahun 2009 tidak diatur secara jelas.

Kata kunci : Kewenangan, Penyidikan, Lingkungan Hidup

1. PENDAHULUAN

Penyelesaian penegakan hukum di bidang lingkungan hidup khususnya terhadap pelaku tindak pidana dilakukan melalui suatu sistem yang dikenal

dengan istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam sistem peradilan pidana ini terdapat 4 (empat) komponen lembaga/instansi yang terkait di dalamnya, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakat, di

mana keempat komponen tersebut dalam sistem peradilan pidana satu dengan lainnya saling terkait. Sehubungan dengan fakta dan problematika Pasal 1 butir 1 KUHAP menyebutkan: "Penyidik adalah pejabat negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dalam Pasal 6 KUHAP diperinci lagi sebagai berikut: 1) Penyidik adalah: a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia ; b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sering timbul konflik kewenangan antara PPNS dan Kepolisian untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana lingkungan sehingga penanganan belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh adanya tumpang tindihnya kewenangan sebagai penyidik yang dapat dilakukan oleh Penyidik PPNS dan POLRI, ketidaklengkapan pengaturan mekanisme penangkapan oleh PPNS dan Penyidik POLRI dalam undang-undang menimbulkan beda persepsi penerapannya. Kondisi tersebut membawa implikasi Penegakan Tindak Pidana Lingkungan dianggap kurang memiliki kemampuan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus tindak pidana lingkungan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penanganan Tindak pidana Lingkungan hidup oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Yang dilakukan Koorporasi ?
2. Bagaimana Langkah Strategis penyelesaian Konflik Kewenangan Penyidikan antara PPNS dengan Penyidik Polri dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan ?

Tujuan Penelitian yakni untuk menemukan Penanganan Tindak pidana Lingkungan hidup oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang dilakukan Koorporasi dan menemukan Langkah-langkah strategis Pemerintahan Kabupaten Bandung terhadap konflik kewenangan penyidikan antara PPNS dengan penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan yang dilakukan koorporasi

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk membantu serta menjawab permasalahan dalam pokok penelitian melalui prosedur dan teknik dengan menggunakan langkah-langkah penelitian, dengan menggunakan metode penelitian secara normatif, dengan mendeskripsikan ilmu hukum pada lapisan dogmatik hukum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan : Yuridist normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis , yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dalam hal ini menganalisis kewenangan POLRI dan PPNS

Penelitian ini dilakukan melalui : Penelitian Kepustakaan. **Langkah awal** dalam penelitian kepustakaan ini data yang dicari adalah data sekunder untuk memperoleh bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang undangan nasional, yang relevan dengan masalah yang dikaji. Bahan hukum sekunder yang meliputi referensi hukum berupa Rancangan Undang-undang, hasil penelitian, jurnal nasional dan internasional , karya tulis dari kalangan hukum dan juga bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia dan

berbagai artikel dimedia cetak, dan dari internet.

Langkah **selanjutnya** melakukan kegiatan penelitian dengan penelusuran teori-teori hukum, yang berkaitan dengan hukum lingkungan serta kebijakan pemerintah. Kemudian mencermati berbagai peraturan hukum untuk memahami hukum yang ada yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian dianalisis secara deskriptif terhadap hukum positif yang berkaitan melalui penalaran teori-teori hukum.

Sebagai pendukung data sekunder dilakukan penelitian lapangan dimaksudkan sebagai pelengkap, yaitu untuk mendukung analisis bahan-bahan hukum primer, sekunder dari tertier. Adapun teknik pengumpulan informasi (data hukum) nya dilakukan dengan cara wawancara terhadap para pihak yang berkopeten yang meliputi pejabat-pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, dan Pemda Kabupaten Bandung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara terminologi Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem¹.

Frank Remington memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*System*

Approach). Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama "*Criminal Justice System*". Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh "*The President's Crime Commission*". Dalam kurun waktu akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970, Criminal Justice sebagai disiplin studi tersendiri telah muncul menggantikan istilah "*Law Enforcement*" atau "*Police Studies*". Perkembangan sistem ini di amerika serikat dan di beberapa negara eropa menjadi model yang dominan dengan menitikberatkan pada "*The Administration Of Justice*" serta memberikan perhatian yang sama terhadap semua komponen dalam penegakan hukum².

M. Yahya Harahap³ menyatakan, bahwa sistem peradilan pidana dalam KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas landasan prinsip "*diferensiasi fungsional*" di antara aparat penegak hukum sesuai dengan "tahap proses kewenangan" yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.

¹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007. hal. 38.

² Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum*

Di Indonesia), Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal. 33.

³ Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.90.

Muladi ⁴ menyatakan, bahwa *integrated criminal justice system* ini adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan.

Geoffrey Hazard Jr. mengemukakan adanya tiga pendekatan dalam sistem peradilan pidana, yaitu : pendekatan normatif, pendekatan administratif dan pendekatan sosial⁵.

1. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan.
2. Pendekatan administratif memandang aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku.
3. Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial.

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi bahwa kebijakan yang

diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain. Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama. Sistem peradilan memiliki tujuan besar yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.

A. Konflik Normatif Kewenangan PPNS Dan Penyidik Polri

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, bahwa telah terjadi kontradiktif (disharmonis) peraturan tentang fungsi dan tugas PPNS dalam penegakan hukum pidana lingkungan. KUHAP sebagai hukum acara pokok dalam penegakan hukum pidana telah disimpangi oleh UU No. 2 Tahun 2002, demikian pula UU No. 32 Tahun 2009.

1. Peran dan fungsi PPNS

- a. KUHAP, Pasal 1 angka (1) dan 6 ayat (1) : Penyidik terdiri dari penyidik polri **atau** pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, mengandung makna bahwa peranan penyidik polri dan PPNS dalam penyidikan adalah sederajat, PPNS bukan subordinat dari penyidik polri (independen). PPNS dapat langsung melakukan penyidikan jika terjadi pelanggaran dan/atau kejahatan lingkungan. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 2 :

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal.1-2.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem peradilan pidana : perspektif eksistensialisme dan abolisionisme*, Bina Cipta ,2006, hal. 17-18.

Penyidik adalah penyidik polri dan PPNS, kata dan mengandung makna kesederajatan.

- b. Sebaliknya UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 3 : Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu: kepolisian khusus, PPNS, dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Disini PPNS adalah subordinat dari penyidik polri (hanya membantu).

2. Prosedur Penyidikan

- a. KUHAP, Pasal 107 : Setelah PPNS selesai melakukan penyidikan, maka PPNS segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum **melalui** penyidik polri;
- b. UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 95 angka (6): Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh PPNS disampaikan kepada penuntut umum.

Disini PPNS menyerahkan langsung kepada penuntut umum, sementara KUHAP harus melalui penyidik polri.

Konflik kewenangan tersebut harus segera diatasi dengan cara harmonisasi (sinkronisasi) ketentuan-ketentuan yang kontradiktif tersebut.

Lingkungan Hidup telah menjadi isu global dan salah satu komponen penting dalam perdagangan internasional. Lingkungan hidup yang dihadapi oleh manusia, sudah menjadi masalah yang menembus batas-batas negara, dan mempertaruhkan eksistensi manusia dimuka bumi.⁶ Manusia hanyalah salah satu unsur dalam mata rantai kehidupan di bumi yang menyebabkan ketergantungan pada sistem planet bumi sebagai life support system.⁷

Pengelolaan harus dilakukan dengan baik dan terpadu yang komprehensif sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 butir (2) UUPPLH :

“ Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.”

Pada dasarnya sanksi yang disediakan oleh *instrument* hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap lingkungan hidup terdiri dari; sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.⁸ Sanksi administrasi merupakan sanksi ringan yang dapat diberikan kepada industri yang melakukan pencemaran lingkungan. Sanksi administrasi ini dapat berbentuk teguran atau peringatan. Sanksi administrasi

⁶ Imas Rosidawati Wiradirja, Hernawati RAS, Syahrul Macmud, *Environmental Performance: Role of Green employee involvement practices, Green Training and Green Shared Vision*, Journal Of Security and Sustainability Issues. (Q2)ISSN 2029-7017 / ISSN 2029-7025 (Online) 2020 Volume 10 Number 2

⁷ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum*

Pidana menurut UU No. 32 Tahun 2009), Graha Ilmu, Bandung, 2011

⁸ T. Subarsyah , *Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Sungai Citarum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Soshum Insentif, Vol. 3 No.2, Oktober 2020

diberikan oleh pihak regulator (pemerintah) terkait dengan suatu izin tertentu yang diberikan kepada industri. Sanksi administrasi tidak dapat memperbaiki pencemaran lingkungan yang sudah terjadi, tetapi mampu mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang lebih parah lagi.

B. Upaya Harmonisasi Terhadap Konflik Kewenangan Antara Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Upaya harmonisasi dapat dilakukan melalui Reformulasi Kewenangan dan Reformulasi kelembagaan. Kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan tidak dapat dipisahkan dari kedudukan POLRI sebagai Korwas PPNS dapat ditinjau dari kerangka *Criminal Justice System* (CJS). Perlibatan PPNS dalam tugas – tugas penyidikan tindak pidana pada tataran taktis dan teknis penyidikan sejak dibentuknya bertugas untuk membantu aparat POLRI dalam melakukan penyidikan, sehingga upaya melembagakan PPNS sebagai lembaga mandiri dalam melakukan tugas penyidikan dikhawatirkan akan berdampak pada tercederainya proses penegakan hukum. Maka oleh sebab tersebut, agar pada saat melaksanakan kewenangan melakukan penyidikan antara PPNS dan POLRI tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, KUHAP telah mengatur hubungan diantara masing – masing institusi tersebut, ialah :

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkedudukan di bawah ; a). Koordinasi penyidik POLRI ; b) di bawah pengawasan penyidik POLRI ;
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik POLRI memberikan

petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan sebagaimana amanat pada Pasal 107 ayat (1) KUHAP ;

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu harus melaporkan kepada penyidik POLRI tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik sebagaimana amanat pada Pasal 107 ayat (2) KUHAP ;

4. Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan, penyerahan hasil penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik POLRI kepada Penuntut Umum sebagaimana amanat pada Pasal 107 ayat (3) KUHAP ;

Point – point di atas dapat dijadikan sebagai acuan supaya kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan tidak dapat dipisahkan dari kedudukan POLRI sebagai Korwas PPNS dapat ditinjau dari kerangka “Sistem Peradilan”. Sebagaimana diketahui, dalam kerangka sistem peradilan institusi utama yang menjadi pilar penopang berjalannya sistem tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Sehingga terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan dapat dihindari. Perlunya peningkatan koordinasi dan pengawasan antar institusi yang terkait dalam penegakan hukum, serta sosialisasi peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan kewenangan melakukan penyidikan agar diperoleh pemahaman yang tepat terkait tugas dan kewenangan masing – masing institusi sekaligus dapat mewujudkan institusi penyidik yang saling melengkapi.

Reformulasi kelembagaan dapat dijadikan sebuah konsep baru dalam penegakan hukum tindak pidana

lingkungan, melihat tumpang tindih kewenangan yang hingga saat ini terjadi masih belum menemukan solusi. Reformulasi kelembagaan antar instansi PPNS dan POLRI kedepannya akan mengembalikan kewenangan penyidik PPNS pada kewenangan terdahulu, dan hanya sebatas melakukan pemeriksaan, sehingga dengan berkurangnya kewenangan tersebut maka kewenangan penyidik POLRI bertambah, maka konsekuensi hukum atas sengketa kewenangan yang hingga saat ini belum terselesaikan akan segera teratasi guna tercapainya tujuan Sistem Peradilan Pidana yang harmonis serta terpadu.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisa dan dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan sejatinya bukanlah proses yang sederhana, dan tidak setiap institusi dapat melaksanakannya. Pengaturan kewenangan PPNS dalam tindak pidana lingkungan hidup tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Oleh sebab tersebut, Negara harus mengakomodir atas permasalahan dengan jalan regulasi yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan antara Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam ketentuan UUPPLH perlu dirubah sebagaimana bunyi Pasal 95 UUPPLH Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri, mengingat prinsip hukum *lex superior derogat legi inferiori* guna tercapainya *integrated justice system* dan agar tidak ada lagi

pengulangan kejahatan hukum pidana lingkungan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Imas Rosidawati Wiradirja at all, (2020) *Environmental Performance: Role of Green employee involvement practices, Green Training and Green Shared Vision*, Journal Of Security and Sustainability Issues.(Q2)ISSN 2029-7017 / ISSN 2029-7025 (Online) 2020 Volume 10 Number 2 [.http://www.tb.lt/Leidiniai/SSI/10-2/10_2_28.pdf](http://www.tb.lt/Leidiniai/SSI/10-2/10_2_28.pdf) URL Indexing Jurnal:[https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.2\(28\)](https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.2(28))
- Lilik Mulyadi, (2007), *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perpektif Teoritik Dan Praktik Peradilan*. Bandung, Mandar Maju.
- Muladi, (1995) *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP
- Romli Atmasasmita, (2006) *Sistem peradilan pidana : perspektif eksistensialisme dan abolisionisme*, Bandung, Bina Cipta .
- Syahrul Machmud,(2011)), *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana menurut UU No. 32* , Bandung, Graha Ilmu
- T. Subarsyah , (2020), *Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Sungai Citarum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Soshum Insentif, Vol. 3No.2.DOI: <https://doi.org/10.36787/jsi.v3i2.264>

Yahya Harahap, (2010), *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta, Sinar Grafika

Yesmil Anwar dan Adang,(2009), *Sistem Peradilan Pidana (Konsep Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Bandung, Widya Padjadjaran